

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)			
Sekolah	: SMA Islam Al Azhar 14	Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas/Semester	: XI/1	Materi Pokok	: Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila
Tahun pelajaran	: 2020/2021	Alokasi Waktu	: 4 x 40 menit

KI:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KD 3	KD 4	Imtaq
3.2 Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.2 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	QS. Ali Imran Ayat 159 <i>"Maka di sebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku Lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."</i>
IPK 3	IPK 4	Tujuan Pembelajaran
3.2.1 Menjelaskan makna dan ciri-ciri pokok demokrasi 3.2.2 Mengklasifikasikan bentuk-bentuk demokrasi 3.2.3 Mengkaji sistem dan prinsip demokrasi di Indonesia 3.2.4 Menganalisis periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia	4.2.1 Menyajikan hasil penalaran tentang kajian sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.2.2 Menyajikan hasil penalaran tentang kajian dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	1. Setelah mengamati tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan makna dan ciri-ciri pokok demokrasi dengan tepat. 2. Setelah membaca buku teks, peserta didik mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk demokrasi dengan benar 3. Setelah menyimak presentasi PPT, peserta didik mampu mengkaji sistem dan prinsip demokrasi di Indonesia dengan lengkap. 4. Setelah menyimak presentasi PPT, peserta didik mampu menganalisis periodisasi demokrasi di Indonesia dengan tepat. 5. Setelah mencermati LKPD, peserta didik mampu menyajikan hasil penalaran tentang kajian sistem demokrasi Pancasila di Indonesia dengan tepat. 6. Setelah mencermati LKPD, peserta didik mampu menyajikan hasil penalaran tentang kajian dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia dengan tepat.

Pertemuan 2

Materi Pembelajaran	: 1. Sistem dan prinsip demokrasi di Indonesia 2. Periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia
----------------------------	--

<p>Platform Zoom Meeting dan Google Classroom</p> <p>Pendekatan Saintifik</p> <p>Model <i>Virtual Discovery Learning (VDL)</i></p> <p>Metode Ceramah, tanya jawab, dan diskusi</p> <p>Alat, Bahan, dan Media 1. Lembar kerja (siswa) 2. Laptop</p> <p>Sumber Belajar 1. Kardiman, Yuyus, dkk. 2017. <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X</i>. Jakarta: Penerbit Erlangga.</p> <p>2. Budiardjo, Miriam. 2008. <i>Dasar-dasar Ilmu Politik</i>. Jakarta: Gramedia.</p> <p>3. Gaffar, Affan. 2004. <i>Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi</i>. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.</p> <p>4. Kardiman, Yuyus, dkk. 2017. <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Kelas SMA/MA Kelas XI</i>. Jakarta: Penerbit Erlangga.</p> <p>5. Lubis, Yusnawan dan Mohamad Sodeli. 2017. <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI</i>. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>6. Yuniarto, Bambang. 2018. <i>Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional</i>. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.</p> <p>7. UUD NRI 1945.</p> <p>8. Nadlirun. 2012. <i>Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia</i>. Jakarta: Balai Pustaka</p>	<p>Langkah Pembelajaran</p> <p>1. Pendahuluan (10 menit) – Meeting Kelas/ Meeting Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran • Peserta didik memimpin untuk menyanyikan satu lagu nasional demi membangkitkan semangat belajar dan nasionalisme. • Guru mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman dari peserta didik atau dalam materi/tema/kegiatan sebelumnya • Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. <p>2. Kegiatan Inti (60 menit) STIMULASI – Meeting Kelas/ Meeting Besar <u>KEGIATAN LITERASI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan motivasi dan rangsangan kepada peserta didik untuk memusatkan perhatian pada topik materi <i>Sistem dan prinsip demokrasi di Indonesia</i> dan <i>Periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia</i> dengan cara menyimak presentasi PPT dari guru tentang <i>Sistem dan prinsip demokrasi di Indonesia</i> dan <i>Periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia</i>. <p>3. IDENTIFIKASI MASALAH – Meeting Kelompok/ Meeting Kecil <u>BERPIKIR KRITIS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan tentang materi <i>Sistem dan prinsip demokrasi</i> serta <i>Periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia</i> dari apa yang diamati untuk mengembangkan kemampuan merumuskan pertanyaan dalam membentuk pikiran kritis. • Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk mengidentifikasi masalah dari Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berisi persoalan yaitu terkait materi <i>Sistem dan prinsip demokrasi</i> serta <i>Periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia</i> untuk mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu serta mampu mengkaji dan menganalisis sesuai indikator yang hendak dicapai. <p>PENGUMPULAN DATA – Meeting Kelompok/ Meeting Kecil <u>KEGIATAN LITERASI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan dari internet menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan menyimak presentasi PPT serta LKPD dan membaca sumber lain selain buku teks yang terkait materi tentang <i>Sistem dan prinsip demokrasi di Indonesia</i> dan <i>Periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia</i>. • Peserta didik dalam kelompoknya mendiskusikan, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi tentang pandangan atas persoalan dalam LKPD terkait Sistem dan prinsip demokrasi serta Periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia. <p>PENGOLAHAN DATA – Meeting Kelompok/ Meeting Kecil <u>KOLABORASI DAN BERPIKIR KRITIS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dalam kelompoknya mengolah data dari hasil pengamatan dengan cara berdiskusi, mengolah informasi, dan mengerjakan beberapa soal tentang materi <i>Sistem dan prinsip demokrasi</i> serta <i>Periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia</i> dalam LKPD yang telah disediakan. <p>VERIFIKASI – Meeting Kelompok/ Meeting Kecil <u>BERPIKIR KRITIS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada internet melalui kegiatan menambah keluasan dan kedalaman sampai pada pengolahan informasi yang bersifat mencari referensi dari berbagai sumber. <p>GENERALISASI – Meeting Kelas/ Meeting Besar <u>KOMUNIKASI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mengkomunikasikan dengan menyampaikan hasil diskusi
---	---

	<p>atau mempresentasikan hasil diskusi, mengemukakan pendapat, dan bertanya atas presentasi tentang <i>sistem dan prinsip demokrasi</i> serta <i>periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan pilihan dari guru tentang <i>sistem dan prinsip demokrasi</i> serta <i>periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia</i> sebagai penialain pengetahuan dalam pembelajaran di forum tugas Google Classroom. <p>KREATIVITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menyimpulkan poin-poin penting terkait presentasi sesuai dengan pengamatan hasil proses diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab yang telah dilakukan. • Guru memberikan penugasan kepada peserta didik untuk membuat infografis tentang studi komparatif terhadap catatan dan pencapaian <i>periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia dari masa ke masa</i> dari berbagai sumber. <p>4. Penutup (10 menit) – Meeting Kelas/ Meeting Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting dalam pembelajaran. • Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. • Peserta didik bersama guru mengagendakan materi yang harus dipelajari untuk pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah berdasarkan materi dalam Google Classroom.
--	---

Penilaian :

- a. Sikap (Observasi, Penilaian diri, Penilaian Antarteman)
- b. Pengetahuan (Tes Tertulis)
- c. Keterampilan (Unjuk Kerja dan Produk)

Mengetahui,
Kepala SMAIA 14

Rasmudi, S.Pd.,M.Pd

Semarang, Juni 2020

Guru Mata Pelajaran

Arie Hendrawan, S.Pd.

PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. Penilaian Sikap

Kompetensi Dasar	Indikator	Kriteria
2.2 Berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	2.2.1 Peserta didik menunjukkan perilaku menghargai terhadap orang yang berbeda pendapat sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Menghargai pendapat teman yang lain selama kegiatan diskusi dan tanya jawab dalam pembelajaran.
	2.2.2 Peserta didik menunjukkan perilaku menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran dengan atau lebih menguatamakan musyawarah.
	2.2.3 Peserta didik menunjukkan perilaku adil dalam pembagian tugas sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Memiliki sikap adil dalam setiap pembagian tugas yang dikerjakan secara berkelompok di pembelajaran.

1. Penilaian Observasi

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut adalah strumen penilaian sikap yang digunakan:

No	Pernyataan	Selalu (S)	Sering (SE)	Kadang-kadang (K)	Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
1.	Menghargai pendapat teman yang lain selama kegiatan diskusi dan tanya jawab dalam pembelajaran.						
2.	Menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran dengan atau lebih menguatamakan musyawarah.						
3.	Memiliki sikap adil dalam setiap pembagian tugas yang dikerjakan secara berkelompok di pembelajaran.						

Catatan :

- Skor penilaian Selalu = 30; Sering = 20; Kadang-kadang = 10
- Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria
- Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal) dikali 100
- Kode nilai / predikat :

75,01 – 100,00	= Sangat Baik (SB)
50,01 – 75,00	= Baik (B)
25,01 – 50,00	= Cukup (C)
00,00 – 25,00	= Kurang (K)

2. Penilaian Diri

Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Namun agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini, menentukan kompetensi yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan merumuskan format penilaiannya. Jadi, singkatnya format penilaiannya disiapkan oleh guru terlebih dahulu. Berikut format penilaian diri yang digunakan:

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
1.	Saya menghargai pendapat teman yang lain selama kegiatan diskusi dan tanya jawab.					
2.	Saya menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran dengan musyawarah.					
3.	Saya bersikap adil dalam pembagian tugas yang dikerjakan secara berkelompok.					

Catatan :

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50
2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria
3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal) dikali 100
4. Kode nilai / predikat :
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)
50,01 – 75,00 = Baik (B)
25,01 – 50,00 = Cukup (C)
00,00 – 25,00 = Kurang (K)

3. Penilaian Teman Sebaya

Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya sendiri. Sama halnya dengan penilaian hendaknya guru telah menjelaskan maksud dan tujuan penilaian, membuat kriteria penilaian, dan juga menentukan format penilaiannya. Berikut Contoh format penilaian teman sebaya:

Nama yang diamati : ...

Pengamat : ...

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
1	Mau menghargai pendapat teman yang lain selama kegiatan diskusi dan tanya jawab.					
2	Mau menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran dengan musyawarah.					
3	Tidak mau bersikap adil dalam pembagian tugas yang dikerjakan secara berkelompok.					

Catatan :

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pernyataan yang positif, sedangkan untuk pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak = 100
2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria
3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal) dikali 100
4. Kode nilai / predikat :
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)
50,01 – 75,00 = Baik (B)
25,01 – 50,00 = Cukup (C)
00,00 – 25,00 = Kurang (K)

B. Penilaian Pengetahuan

Kisi-kisi

No.	Kompetensi Dasar	Materi	Indikator	Indikator Soal	No. Soal	Bentuk Soal	Level Kognitif
1.	3.2 Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Makna dan ciri-ciri pokok demokrasi	Peserta didik dapat menjelaskan makna pokok demokrasi.	Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan makna pokok demokrasi sebagai kedaulatan rakyat	1	Pilihan ganda	C2
			Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri pokok demokrasi	Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri pokok demokrasi dalam akuntabilitas	2	Pilihan ganda	C2
		Bentuk-bentuk pelaksanaan demokrasi	Peserta didik dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelaksanaan demokrasi	Disajikan pernyataan, peserta didik dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk	3	Pilihan ganda	C3

				pelaksanaan demokrasi menurut titik berat perhatiannya			
		Periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia	Peserta didik dapat menganalisis periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia	Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menganalisis periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia pada era demokrasi parlementer (1950-1959)	4	Pilihan ganda	C4
			Peserta didik dapat menganalisis periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia	Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menganalisis periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia dalam konteks latar belakang lahirnya demokrasi reformasi.	5	Pilihan ganda	C4

Kerjakan soal pilihan ganda berikut dengan tepat!

- Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Berdasarkan uraian tersebut, makna demokrasi yang tepat adalah....
 - keadilan rakyat
 - kebutuhan rakyat
 - kedaulatan rakyat
 - keinginan rakyat
 - kepentingan rakyat
- Dalam sistem politik demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Berdasarkan hal tersebut, ciri pokok demokrasi yang dimaksud adalah....
 - akuntabilitas
 - Transparansi
 - rotasi kekuasaan
 - Pemilihan Umum
 - rekrutmen politik terbuka
- Demokrasi telah menjadi sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing negara. Adanya keanekaragaman sudut pandang tersebut membuat demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah pembagian demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya yang terdiri atas....
 - demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi gabungan
 - demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat
 - demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung
 - demokrasi kerakyatan dan demokrasi kekuasaan
 - demokrasi asli dan demokrasi perwakilan
- Dalam periode pelaksanaan demokrasi 1950-1959, Indonesia menganut demokrasi parlementer. Saat itu terjadi banyak pergantian kabinet karena situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. Kabinet jatuh bangun karena muncul mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu, juga terjadi perdebatan dalam Konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Berdasarkan hal tersebut, alasan yang ikut mendorong jatuh bangunnya kabinet adalah...
 - Lembaga perwakilan rakyat memainkan peran sangat tinggi dalam proses politik.

- B. Masyarakat menggunakan jaminan hak-hak dasar untuk mengkritik pemerintah.
 - C. Kehidupan partai yang berkembang pesat dengan diberikannya keleluasaan.
 - D. Presiden cenderung melaksanakan kekuasaan pemerintahan secara otoriter.
 - E. Pemilihan Umum demokratis baru dilaksanakan satu kali pada tahun 1955.
5. Dalam periode pelaksanaan demokrasi di periode 1965-1998, ruang kebebasan pers sangat dibatasi, termasuk jaminan terhadap hak-hak politik dari warga negara. Selanjutnya, Pemilu yang berjalan kurang demokratis. Rotasi kekuasaan juga belum dilakukan dengan pola rekrutmen politik yang terbuka untuk pengisian jabatan publik. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi lahirnya....
- A. Demokrasi parlementer yang memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar warga.
 - B. Demokrasi terpimpin yang membuat sistem pemerintahan menjadi lebih stabil.
 - C. Demokrasi liberal yang memberikan keleluasaan terhadap sistem multipartai.
 - D. Demokrasi reformasi yang menjamin kebebasan berekspresi dan pendapat.
 - E. Demokrasi orde baru yang mempunyai rotasi kekuasaan sangat kecil.

Kunci dan Pedoman Penskoran

No. Soal	Kunci	Skor
1.	C	20
2.	A	20
3.	A	20
4.	A	20
5.	D	20
Jumlah		100

Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Remedial

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka guru bisa memberikan soal tambahan.

PROGRAM REMIDI

Sekolah :
 Kelas/Semester :
 Mata Pelajaran :
 Ulangan Harian Ke :
 Tanggal Ulangan Harian :
 Bentuk Ulangan Harian :
 Materi Ulangan Harian :
 (KD / Indikator) :
 KKM :

No	Nama Peserta Didik	Nilai Ulangan	Indikator yang Belum dikuasai	Bentuk Tindakan Remedial	Nilai Setelah Remedial	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
dst						

1. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Berdasarkan uraian tersebut, jelaskan makna demokrasi yang tepat!
2. Dalam sistem politik demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Berdasarkan hal tersebut, jelaskan ciri pokok demokrasi yang dimaksud!
3. Demokrasi telah menjadi sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing negara. Adanya keanekaragaman sudut pandang tersebut membuat demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi berbagai macam bentuk. Jelaskan pembagian demokrasi berdasarkan tiik berat perhatiannya!

b. Pengayaan

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Selanjutnya, guru memberikan soal pengayaan.

1. Dalam periode pelaksanaan demokrasi 1950-1959, Indonesia menganut demokrasi parlementer. Saat itu terjadi banyak pergantian kabinet karena situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. Kabinet jatuh bangun karena muncul mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu, juga terjadi perdebatan dalam Konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Berdasarkan hal tersebut, jelaskan alasan yang ikut mendorong jatuh banggunya kabinet!
2. Setelah dari era orde baru, demokrasi Indonesia memasuki era reformasi. Di sini memiliki beberapa indikator pelaksanaan demokrasi. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Ketiga, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Jelaskan latar belakang pelaksanaan demokrasi di era reformasi!

C. Penilaian Keterampilan

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Aspek Keterampilan
4.2 Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.2.1 Menyajikan hasil penalaran tentang kajian sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.2.2 Menyajikan hasil penalaran tentang kajian dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	1. Peserta didik mendapatkan informasi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, kemudian mempresentasikan hasil penalaran tentang analisis terkait sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Peserta didik mendapatkan informasi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, kemudian membuat produk infografis dari hasil penalaran tentang analisis komparatif terkait dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Penilaian Unjuk Kerja

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (100)	Baik (75)	Kurang Baik (50)	Tidak Baik (25)
1	Penggunaan data dan informasi yang akurat				
2	Penyajian konten presentasi yang menarik				
3	Pelafalan dan kelancaran presentasi				
4	Pemberian respons dengan tepat				

Keterangan:

- 100 = Sangat Baik
- 75 = Baik
- 50 = Kurang Baik
- 25 = Tidak Baik
- Nilai unjuk kerja = Nilai yang diperoleh dibagi 4
- Cara mencari nilai = Jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor ideal

2. Penilaian Produk (Infografis)

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (100)	Baik (75)	Kurang Baik (50)	Tidak Baik (25)
1	Kreativitas				
2	Ketepatan isi				
3	Kelengkapan				
4	Sistematikasi				

Keterangan:

100	= Sangat Baik
75	= Baik
50	= Kurang Baik
25	= Tidak Baik
Nilai produk	= Nilai yang diperoleh dibagi 4
Cara mencari nilai	= Jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor ideal

Mengetahui,
Kepala SMAIA 14

Rasmudi, S.Pd.,M.Pd

Semarang, Juni 2020

Guru Mata Pelajaran

Arie Hendrawan, S.Pd.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Sekolah	:	SMA Islam Al Azhar 14 Semarang
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	:	XI/1
Kompetensi Dasar (KD)	:	3.2 Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.2 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	:	3.2.1 Menjelaskan makna dan ciri-ciri pokok demokrasi 3.2.2 Mengklasifikasikan bentuk-bentuk demokrasi 3.2.3 Mengkaji sistem dan prinsip demokrasi di Indonesia 3.2.4 Menganalisis periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia 4.2.1 Menyajikan hasil penalaran tentang kajian sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.2.2 Menyajikan hasil penalaran tentang kajian dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Materi Pokok	:	Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila.
Sub Materi	:	1. Sistem dan prinsip demokrasi di Indonesia 2. Periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia

A. Kompetensi yang ingin Dicapai

1. Peserta didik mampu menjelaskan makna dan ciri-ciri pokok demokrasi
2. Peserta didik mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelaksanaan demokrasi
3. Peserta didik mampu mengkaji sistem dan prinsip demokrasi di Indonesia
4. Peserta didik mampu menganalisis periodisasi dan dinamika demokrasi di Indonesia

B. Petunjuk Belajar

1. Pelajari informasi pendukung dari rangkuman bahan ajar.
2. Perhatikan teks dan gambar yang ada di perintah penugasan.
3. Analisis permasalahan sesuai dengan penugasan yang diberikan.
4. Kerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan.
5. Gunakan internet untuk mencari data dan informasi pendukung.
6. Setelah selesai, presentasikan hasil kerja Anda.
7. Perbaiki hasil kerja Anda jika ada masukan dari peserta didik lain.

C. Informasi Pendukung

1. Sistem dan Prinsip Demokrasi di Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka.

Kemudian, bagaimana dengan prinsip Demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi dalam Yuniarto (2018: 87) mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- a) **Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.** Seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) **Demokrasi dengan kecerdasan.** Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata.
- c) **Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.** Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.
- d) **Demokrasi dengan rule of law.** kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, memberikan keadilan hukum, menjamin kepastian hukum, dan mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum.
- e) **Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.** Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab.
- f) **Demokrasi dengan hak asasi manusia.** Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja

menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat, manusia seutuhnya.

- g) **Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.** Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.
- h) **Demokrasi dengan otonomi daerah.** Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden.
- i) **Demokrasi dengan kemakmuran.** Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan.
- j) **Demokrasi yang berkeadilan sosial.** Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat.

2. Periodisasi Demokrasi di Indonesia

a. Pelaksanaan Demokrasi pada Periode 1945 – 1949

Ada beberapa catatan penting dalam pelaksanaan demokrasi pada periode 1945 – 1949. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

b. Pelaksanaan Demokrasi pada Periode 1949 – 1959

Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. *Pertama*, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Keempat, sekali pun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal.

c. Pelaksanaan Demokrasi pada Periode 1959 – 1965

Pada masa ini berlaku sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik Presiden tidak banyak diberikan. Keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

d. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1965 – 1998

Pada masa ini disebut sebagai demokrasi Pancasila atau demokrasi orde baru. Disebut demikian karena memiliki visi untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ada beberapa karakteristik demokrasi pada masa orde baru ini. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi karena tidak melahirkan persaingan yang sehat. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara, salah satunya terkait hak asasi manusia dan kebebasan pers.



Gambar 2. Pengunduran Diri Presiden Soeharto Menandai Dimulainya Era Reformasi

(Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150521225612-20-54917/undurkan-diri-soeharto-berjalan-santai-tinggalkan-istana>)

e. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998 - sekarang

Setelah dari era orde baru, demokrasi Indonesia memasuki era reformasi. Di sini memiliki beberapa indikator pelaksanaan demokrasi. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Ketiga, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Keempat, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Kelima, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keenam, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.

D. Tugas

1. Bacalah berita tentang keributan dalam demo Omnibus Law di bawah dengan cermat!

Demo tolak Omnibus Law di berbagai kota berakhir ricuh, lebih dari seribu orang ditangkap polisi

Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung dari Selasa hingga Kamis (06-08/10) di berbagai kota di Indonesia berakhir ricuh. Demonstrasi yang ricuh juga terjadi di ring 1 Istana Kepresidenan, Jakarta. Massa bentrok dengan aparat.

Polisi menyatakan menangkap lebih dari seribu orang dengan tuduhan berbuat rusuh, terkait demo di berbagai kota ini. BBC Indonesia mendokumentasikan demonstrasi menolak Omnibus Law di Bandar Lampung, Yogyakarta, Makassar, dan Jakarta.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan polisi "telah melakukan pelanggaran" saat menangani aksi massa yang menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.



Selain Demonstrasi yang Anarkis, sebagian Polisi juga Melakukan Tindakan Represif

(Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/>)

Organisasi ini mencatat tindakan kekerasan oleh aparat polisi terjadi di 18 provinsi dan menilai adanya pelanggaran Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Mantan Karo Penmas Divisi Humas Polri ini menegaskan penegakan hukum terhadap pedemo yang melakukan tindak anarkis sebagai upaya Polri menjaga wibawa negara sekaligus memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dan intoleran," tegas jenderal bintang dua ini.

Sementara itu dari seluruh pedemo yang telah ditangkap, Polri menyatakan 145 orang diantaranya reaktif Covid-19 setelah dilakukan rapid test.

Sumber:

- a. <https://www.bbc.com/indonesia/media-54474443>
b. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201010133935-12-556845/polisi-tangkap-5918-massa-demo-omnibus-law-87-orang-dibui>

Setelah membaca berita di atas, analisis permasalahan yang anak-anak temukan dan kerjakan soal berikut di lembar kerja yang telah disediakan!

- a. Identifikasi dan analisis peristiwa di atas dari tiga prinsip demokrasi di Indonesia yang kalian pilih! Apakah sesuai atau bertentangan? Jelaskan alasannya!
b. Identifikasi masalah tentang bagaimana penerapan kebebasan berpendapat yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila di Indonesia!

2. Perhatikan kutipan e-book yang berjudul *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia* berikut!

BAB I PENDAHULUAN

Demokrasi bukan merupakan hal baru bagi Indonesia karena sejak pertama kali negeri ini didirikan sudah menggunakan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sudah mengalami penyesuaian tidak asli mengadopsi demokrasi ala barat. Artinya, demokrasi yang cocok untuk kita adalah demokrasi untuk semua bukan demokrasi ala barat yang memuja kebebasan tanpa batas. Karena di dalam ideologi Pancasila tidak menganut paham Sosialis ataupun Liberalis karena negara Indonesia memiliki ideologi yang merupakan jembatan dari kedua ideologi tersebut.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pemilu 1955 yang merupakan pesta demokrasi pertama di Indonesia, yang diikuti sebanyak 29 partai politik. Pemilu yang berlangsung pada saat pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap ini memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante dan dimenangkan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Hal ini menunjukkan eksistensi Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi.

Dalam perjalanan melaksanakan demokrasi, terjadi penyimpangan. Diantaranya terjadi ketika demokrasi Indonesia berubah menjadi demokrasi terpimpin, yaitu:

1. Pengekangan Pers
Pengekangan pers sangat bertentangan dengan demokrasi karena demokrasi sangat mendukung kebebasan pers di negara demokrasi.
2. Pembuatan UUD Subversif
Pemerintahan Orde Baru ini membuat Undang-Undang Subversif tujuannya untuk melawan musuh-musuh politik rezim Orde Baru.
3. Melakukan fusi partai politik
Pada saat itu pemerintahan Orde Baru melakukan fusi partai politik. Para pegawai negeri dan ABRI mendirikan Partai Golkar sebagai kendaraan politik Soeharto mengikuti pemilu. Partai-partai Islam digabung atau difusi menjadi satu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI) dll, digabung atau difusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ironisnya, selama pemerintahan Orde Baru, pemilu sejak tahun 1971–1997 selalu dimenangkan oleh Partai Golkar. Dan fusi partai sangat bertentangan dengan demokrasi tersebut.
4. Tidak adanya penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Penembakan misterius (Petrus) menjadi pelanggaran HAM yang dilegalisasi oleh pemerintahan Orde Baru dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada lagi kasus Timor Timur yang membuat Indonesia dikucilkan dunia Internasional. Ada banyak kasus HAM yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru.

1. terjadi pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS;
2. pembubaran konstituante hasil pemilu;
3. pembredelan pers atas dalih mengganggu revolusi.

Hal-hal di atas merupakan upaya pencideraan demokrasi yang kita bangun dan jauh dari aspek yang diharapkan demokrasi. Sikap Presiden Soekarno dimanfaatkan oleh dua kekuatan pendukung Presiden Soekarno, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). PKI mengupayakan memasukan ideologi komunis dalam pemerintahan Soekarno. Usulan Jenderal Ahmad Nasution yang mengusulkan Dwi Fungsi ABRI yang melibatkan ABRI dalam pemerintahan. Kedua hal tersebut sangat bertentangan dengan demokrasi sendiri.

Setelah Soekarno jatuh, Soeharto yang berasal dari ABRI menggantikan kedudukannya sebagai presiden RI. Pada saat itu masyarakat sedang sangat anti komunis akibat kejadian pembunuhan para jenderal Angkatan Darat dalam peristiwa G. 30. S/ PKI yang didalangi oleh PKI. Soeharto menggunakan kondisi masyarakat pada waktu itu untuk merebut kekuasaan dengan dalih menumpas komunisme di Indonesia. Pemerintahan Soeharto menamakan kabinetnya dengan Orde Baru. Langkah pertama pemerintahan Orde Baru pada waktu itu adalah mengkampanyekan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, pada kenyataannya, Pancasila digunakan untuk menekan demokrasi dengan melakukan pengekan. Pengekangan-pengekangan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru antara lain sebagai berikut.

5. Tindak pidana korupsi
Korupsi yang dilakukan Soeharto dan kroni-kroninya membuat majalah "Time" menuliskan Soeharto ke dalam penguasa korup di dunia. Kejadian-kejadian tersebut di atas sangat bertentangan dengan amanat rakyat untuk menjadi presiden. Akhirnya rakyat Indonesia marah dan para mahasiswa yang dikomandoi Amien Rais melakukan serangkaian demonstrasi yang berujung reformasi pada tahun 1998. Klimaksnya tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mundur dari jabatan Presiden RI ke-2 yang disebut *Lengser Keprabon*. Setelah Soeharto mundur, digantikan BJ Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Pada pemerintahan Habibie terjadi peristiwa bersejarah, yaitu pemilu pertama setelah Reformasi pada tahun 1999 dan dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun terjadi kekisruhan politik karena saat itu walaupun PDIP menang, namun yang menjadi presiden adalah KH. Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP menjadi wakil presiden. Mengapa partai pemenang pemilu tidak otomatis menjadi presiden? Karena saat itu pemilihan umum hanya memilih anggota DPR/MPR. Kemudian DPR dan MPR yang memilih presiden dan wakil presiden saat itu. Namun pemerintahan KH Abdurrahman Wahid hanya bertahan 2 tahun. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan Sidang Istimewa (SI) dan melengserkan presiden Abdurrahman Wahid karena kasus Brunei Gate dan digantikan oleh Wakil Presiden Megawati menjadi presiden Republik Indonesia yang ke-4.

Sumber: Nadlirun. 2012. *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Setelah membaca kutipan e-book di atas, analisis permasalahan yang anak-anak temukan dan kerjakan soal berikut di lembar kerja yang telah disediakan!

- a. Identifikasi pencapaian dan catatan (kelebihan dan kekurangan) dari masing-masing periode demokrasi di Indonesia secara urut!
- b. Tuangkan hasil jawaban analisis kalian pada poin A menjadi sebuah infografis digital yang harus memuat poin-poin kunci, deskripsi, data, dan gambar!